

ANALISIS TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014-2024

Sinta Meilinda¹, Putri Cahyani², Sri Ningsih³

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi ^{1,2,3}

Email: sintameilinda2006@gmail.com¹, putricahyani700@gmail.com², sriningsih@unja.ac.id³

Informasi	Abstract
Volume : 3 Nomor : 3 Bulan : Maret Tahun : 2026 E-ISSN : 3062-9624	<i>Unemployment remains a major issue in economic development in many countries, including Indonesia. One important indicator used to describe labor market conditions and the economy's ability to absorb the labor force is the Open Unemployment Rate (OUR). This study aims to analyze the development of the Open Unemployment Rate (OUR) in West Java Province during the period of 2014-2024 and to examine West Java Province's position compared to the national labor market. This study employed a quantitative descriptive method using secondary data obtained from the Badan Pusat Statistik (BPS). The analysis shows that the Open Unemployment Rate (OUR) in West Java Province fluctuated during the study period. In 2020, a significant increase occurred due to the impact of the COVID-19 pandemic, with the Open Unemployment Rate (OUR) reaching 10,46%. This condition indicates that labor market dynamics are influenced by several factors, such as economic growth, the size of the labor force, employment opportunities, and the availability of jobs. Therefore, the analysis of the Open Unemployment Rate (OUR) is crucial as a basis for formulating effective and targeted employment policies to reduce unemployment and increase employment opportunities.</i> Keyword: <i>Open Unemployment Rate (OUR); Unemployment; Labor Market; Labor Force; West Java Province; Economic Growth</i> Abstrak <i>Pengangguran masih menjadi permasalahan utama dalam pembangunan ekonomi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Salah satu indikator penting yang digunakan untuk menggambarkan kondisi pasar tenaga kerja serta kemampuan perekonomian dalam menyerap angkatan kerja adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Barat selama periode 2014-2024 serta melihat posisi Provinsi Jawa Barat jika dibandingkan dengan kondisi pasar tenaga kerja secara nasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil analisis menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Barat mengalami naik-turun/fluktuasi selama periode penelitian. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan yang signifikan sebagai dampak dari pandemi COVID-19, di mana Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 10,46%. Kondisi ini menunjukkan bahwa dinamika pasar tenaga kerja dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pertumbuhan ekonomi, jumlah angkatan kerja, kesempatan kerja, serta ketersediaan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, analisis mengenai Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi sangat penting sebagai dasar dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan yang efektif dan tepat sasaran agar dapat menekan tingkat pengangguran dan meningkatkan kesempatan kerja.</i> Kata Kunci: <i>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT); Pengangguran; Pasar Tenaga Kerja; Angkatan Kerja; Provinsi Jawa Barat; Pertumbuhan Ekonomi</i>

A. PENDAHULUAN

Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh berbagai indikator, salah satunya adalah tingkat pengangguran yang juga menjadi permasalahan utama dalam ketenagakerjaan. Menurut (Badan Pusat Statistik, 2018) pengangguran adalah suatu keadaan di mana seorang penduduk tergolong ke dalam angkatan kerja, yang aktif mencari pekerjaan tetapi belum memperolehnya, sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan. Berdasarkan penelitian (Muslim, 2014) menyebutkan bahwa suatu permasalahan kompleks yang disebabkan oleh berbagai faktor dan saling berinteraksi sehingga apabila tidak diberikan solusi dapat menimbulkan kemiskinan dan kerawanan sosial adalah pengangguran. Permasalahan ini muncul ketika jumlah tenaga kerja yang tersedia tidak sebanding dengan kesempatan kerja yang mampu disediakan oleh perekonomian. Tingginya tingkat pengangguran dapat memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, serta stabilitas sosial dalam suatu wilayah.

Dalam beberapa kajian ketenagakerjaan, terdapat beberapa konsep dasar yang perlu dipahami. Penduduk merupakan semua orang yang berdomisili di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu dan tercatat sebagai bagian dari populasi wilayah tersebut. Dari seluruh penduduk tersebut terdapat kelompok yang disebut tenaga kerja, yaitu penduduk yang berada pada usia kerja dan memiliki potensi untuk bekerja. Sedangkan, angkatan kerja merupakan bagian dari tenaga kerja yang aktif secara ekonomi, yaitu mereka yang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan (David et al., 2019).

Pengangguran sendiri dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis. Menurut (Sukirno, 1994) secara umum pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran friksional, pengangguran struktural, pengangguran siklikal, dan pengangguran musiman. Sementara itu, dari segi bentuk, pengangguran dibedakan menjadi pengangguran terbuka, pengangguran setengah menganggur, dan pengangguran terselubung. Jadi, pengangguran bukan hanya berarti tidak ada pekerjaan, tapi juga menunjukkan ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja yang tersedia dan kondisi pasar tenaga kerja (Sayifullah & Gandasari, 2016).

Selain itu, tingkat pengangguran juga memiliki hubungan yang erat dengan pertumbuhan ekonomi yang dijelaskan melalui Hukum Okun (*Okun's Law*) (Pasaribu, 2022). Secara umum, peningkatan pertumbuhan ekonomi akan mendorong aktivitas produksi dan investasi sehingga membuka lebih banyak kesempatan kerja, sedangkan perlambatan pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan permintaan tenaga kerja dan meningkatkan

jumlah pengangguran. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengangguran dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, tingkat pendidikan, kualitas sumber daya manusia, serta ketersediaan lapangan kerja (Puspita & Athoillah, 2024). Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas pada dasarnya mampu bersaing dalam dunia kerja sehingga dapat menurunkan angka pengangguran, meskipun belum tentu mampu mengurangi ketimpangan pendapatan antar penduduk. Oleh karena itu, berkurangnya angka pengangguran sering digunakan sebagai salah satu indikator untuk menilai inklusivitas pertumbuhan ekonomi suatu negara (Ningsih et al., 2025).

Menurut (Badan Pusat Statistik, 2023), tingkat pengangguran di Indonesia umumnya diukur menggunakan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yaitu persentase jumlah penganggur terhadap total angkatan kerja. TPT menggambarkan kondisi pasar tenaga kerja serta kemampuan perekonomian dalam menyerap tenaga kerja yang tersedia (Pamungkas & Kartika, 2025). Semakin tinggi nilai TPT menunjukkan bahwa semakin banyak angkatan kerja yang belum terserap dalam kegiatan ekonomi. Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia yaitu mencapai sekitar 50,3 juta jiwa pada tahun 2024 (Badan Pusat Statistik, 2025), sehingga memiliki jumlah tenaga kerja yang cukup besar. Kondisi ini menjadikan Jawa Barat sebagai wilayah yang memiliki dinamika pasar tenaga kerja yang kompleks. Dengan berbasis industri manufaktur yang kuat di kawasan Bekasi–Karawang–Purwakarta, sektor pertanian di wilayah selatan dan timur, serta sektor jasa yang berkembang di Bandung Raya, Jawa Barat seharusnya memiliki kemampuan dalam menyerap tenaga kerja yang besar. Namun dalam kenyataannya, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Jawa Barat masih sering berada di atas rata-rata nasional dalam beberapa tahun terakhir (Septiyanto & Tusianti, 2020).

Berdasarkan data Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat periode 2014–2024 (Badan Pusat Statistik (BPS), 2025), terlihat bahwa tingkat pengangguran mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 tingkat pengangguran tercatat sebesar 8,45%, kemudian meningkat menjadi 8,72% pada tahun 2015 dan 8,89% pada tahun 2016. Setelah itu mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 8,22% dan relatif stabil pada tahun 2018 sebesar 8,23%. Pada tahun 2019 tingkat pengangguran kembali menurun menjadi 8,04%. Namun pada tahun 2020 terjadi peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 10,46%, yang sebagian besar dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyaknya tenaga kerja yang di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dari pekerjaan dan dirumahkan, sehingga tingkat pengangguran semakin tumbuh tinggi (Munawir & Saharuddin, 2023). Hal

ini juga menyebabkan aktivitas perekonomian dan pasar tenaga kerja menjadi sedikit terganggu. Selanjutnya tingkat pengangguran mulai mengalami penurunan secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya, yaitu 9,82% pada tahun 2021, 8,31% pada tahun 2022, 7,44% pada tahun 2023, dan menurun kembali menjadi 6,75% pada tahun 2024. Fluktuasi tingkat pengangguran tersebut menunjukkan bahwa kondisi pasar tenaga kerja sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan sosial.

Oleh karena itu, analisis mengenai tingkat pengangguran pada tingkat daerah menjadi penting untuk memahami dinamika ketenagakerjaan serta sebagai dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan yang lebih efektif dan efisien (Darmawan & Mifrahi, 2022). Berdasarkan uraian tersebut, analisis mengenai perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Barat perlu dilakukan. Melalui analisis data pada tahun 2014–2024, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan kondisi pasar tenaga kerja serta faktor-faktor yang memengaruhi kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Barat.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang bertujuan untuk menganalisis perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2014–2024. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan menggunakan instrumen penelitian serta analisis data yang bersifat statistik/angka. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber yang telah dipublikasikan oleh lembaga resmi atau pihak lain yang sebelumnya telah mengumpulkan dan mengolah data tersebut (Sugiyono, 2019). Data sekunder yang digunakan berupa data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Barat tahun 2014–2024 yang diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut disajikan dan dianalisis untuk melihat perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2014-2024 (dalam rentang waktu 10 tahun).

Penelitian ini menggunakan data *time-series*. Data *time-series* merupakan sebuah kumpulan pengamatan terhadap nilai-nilai sebuah variabel dari beberapa periode waktu yang berbeda (seperti tahunan, bulanan, atau harian), sehingga dapat digunakan untuk melihat perkembangan suatu variabel dari waktu ke waktu (Gujarati & Porter, 2012). Data *time-series* ini digunakan untuk mengamati pola perubahan, tren, serta fluktuasi yang terjadi selama periode pengamatan. Pada penelitian ini, data time series ditunjukkan dengan periode waktu

penelitian yang digunakan yaitu tahun 2014-2024.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan tingkat pengangguran dari laporan statistik, publikasi resmi, serta berbagai literatur yang relevan seperti jurnal dan artikel ilmiah yang membahas mengenai ketenagakerjaan dan pengangguran. Sementara itu, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu dengan mengamati perkembangan data TPT dari tahun ke tahun untuk melihat pola perubahan, tren, serta fluktuasi yang terjadi selama periode penelitian. Analisis ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai TPT setiap tahun untuk mengetahui kecenderungan peningkatan atau penurunan tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Barat. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan untuk memberikan gambaran mengenai TPT di wilayah tersebut. Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai kondisi pengangguran berdasarkan data yang tersedia.

Dalam penelitian ini, Tingkat Pengangguran Terbuka dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)} = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

Rumus tersebut digunakan untuk mengetahui persentase jumlah pengangguran dibandingkan dengan total angkatan kerja dalam suatu wilayah. Semakin tinggi nilai TPT, menunjukkan semakin besar proporsi angkatan kerja yang belum terserap dalam kegiatan perekonomian. Melalui metode ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Barat dalam kurun waktu 10 tahun serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dinamika ketenagakerjaan di daerah tersebut.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Data

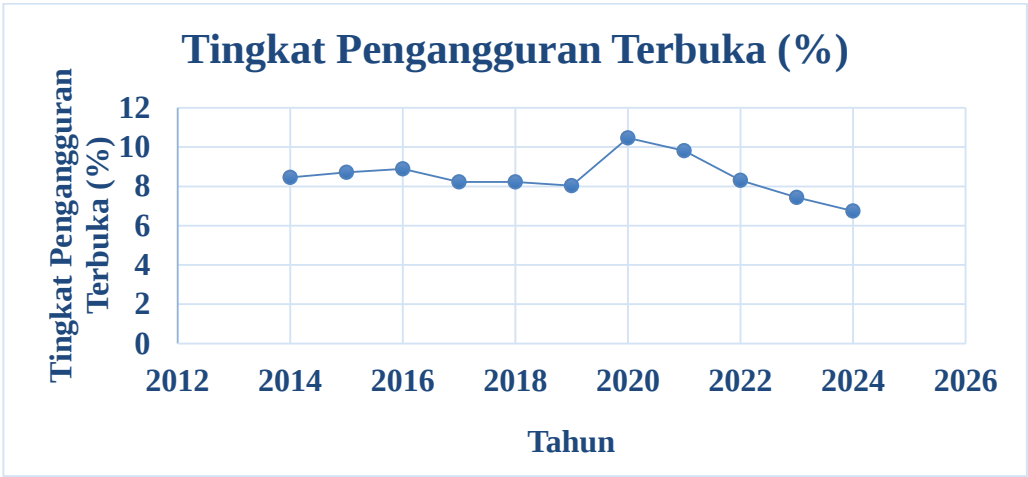
Tabel 1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2024

No	Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
1	2014	8,45
2	2015	8,72
3	2016	8,89
4	2017	8,22
5	2018	8,23
6	2019	8,04

7	2020	10,46
8	2021	9,82
9	2022	8,31
10	2023	7,44
11	2024	6,75

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Jawa Barat (data diolah)

Gambar 1.1 Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Jawa Barat (data diolah)

Analisis Tren yang Terjadi pada Tingkat Pengangguran Terbuka

Berdasarkan data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Barat pada periode 2014-2024, data menunjukkan perkembangan fluktuatif (naik dan turun) yang dipengaruhi oleh beberapa faktor kondisi ekonomi dan peristiwa-peristiwa yang terjadi, terkhusus pada saat terjadinya pandemi COVID-19. Melalui data yang tersedia, tren Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Barat dapat dibagi ke dalam beberapa fase perkembangan.

Fase I: Kondisi Relatif Stabil (2014-2016): Dalam periode ini kondisi yang terjadi pada tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat berada di posisi yang bergerak secara stabil namun pada angka yang cukup tinggi. Saat 2014 TPT tercatat sebesar 8,45%, lalu mengalami peningkatan di tahun berikutnya menjadi 8,72% dan kembali mengalami peningkatan di tahun 2016 yaitu sebesar 8,89%. Adanya kenaikan di setiap tahunnya menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja lebih besar daripada ketersediaan lapangan pekerjaan. Periode ini ditandai oleh tekanan struktural akibat percepatan otomasi di sektor manufaktur dan relokasi industri ke kawasan yang lebih kompetitif. Jawa Barar sebagai provinsi yang memiliki jumlah penduduk cukup besar tentunya akan terjadi tingkat persaingan kerja yang cukup tinggi.

Fase II: Penurunan Bertahap (2017-2019): Pada periode ini tingkat pengangguran menunjukkan adanya tren penurunan secara bertahap dari tahun ke tahun. Saat 2017 angka TPT turun menjadi 8,22%, lalu di tahun 2018 angka yang diperoleh menunjukkan adanya kondisi yang stabil pada angka 8,23%, kemudian di tahun 2019 mengalami penurunan kembali menjadi 8,04%. Angka yang memperlihatkan adanya penurunan ini membuktikan bahwa kondisi pasar tenaga kerja di Jawa Barat mengalami perbaikan. Beberapa faktor yang memengaruhi seperti adanya investasi di sektor industri, sektor barang dan jasa mengalami perkembangan, serta meningkatnya program pelatihan kerja sehingga kualitas tenaga kerja ikut meningkat.

Fase III: Lonjakan Akibat Pandemi (2020-2021): Pandemi COVID-19 memberikan perubahan yang signifikan pada TPT. Perubahan lonjakan TPT yang paling signifikan terlihat di tahun 2020 yang mencapai angka sangat tinggi sebesar 10,46%. Peningkatan ini sangat dipengaruhi oleh pandemi *COVID-19* yang menyebabkan banyak kegiatan ekonomi mengalami penurunan drastis. Banyak pekerja yang mengalami PHK karena perusahaan melakukan pengurangan dan pembatasan operasional tenaga kerja, bahkan banyak usaha yang tutup sehingga tingkat pengangguran meningkat tajam. Pada tahun 2021 angka sebesar 9,82% menunjukkan bahwa tingkat pengangguran mulai menurun meskipun masih tergolong di angka yang besar. Di tahun ini memperlihatkan bahwa kegiatan perekonomian mulai berangsur pulih, namun dalam pasar tenaga kerja proses pemulihan berjalan secara bertahap.

Fase IV: Pemulihan Pasca Pandemi (2022-2024), Memasuki tahun 2022 sampai tahun 2024, TPT menunjukkan tren penurunan yang cukup konsisten. Di tahun 2022 turun menjadi 8,31%, lalu di tahun 2023 mengalami penurunan kembali sebesar 7,44%, dan di tahun 2024 turun hingga mencapai 6,75%. Angka penurunan ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi di Jawa Barat perlahan mengalami kondisi yang pulih dan stabil setelah terjadi pandemi, sehingga lapangan pekerjaan kembali tersedia untuk masyarakat umum. Pemulihan di dorong dengan kegiatan ekonomi yang meningkat, perkembangan sektor industri dan jasa, serta meningkatnya peluang kerja di sektor digital. Selain itu adanya kebijakan pemerintah yang mendukung investasi dan pemulihan ekonomi turut ikut andil dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Perbandingan dengan Provinsi Lain dan Rata-rata Nasional

Untuk memposisikan kondisi Jawa Barat dalam konteks yang lebih luas, berikut perbandingan TPT antar provinsi besar berdasarkan data BPS Agustus 2024:

Tabel 1.2 Perbandingan TPT antar Provinsi di Indonesia (Agustus 2024)

No	Provinsi	TPT (%)	Status vs Nasional
1	Jawa Barat	6,75	Di Atas Nasional
2	Banten	6,68	Di Atas Nasional
3	Sulawesi Tenggara	3,09	Di Bawah Nasional
4	DKI Jakarta	6,21	Di Atas Nasional
5	Jawa Timur	4,19	Di Bawah Nasional
6	Jawa Tengah	4,78	Di Bawah Nasional
7	Jambi	4,48	Di Bawah Nasional
8	Kalimantan Selatan	4,20	Di Bawah Nasional
9	Rata-rata Nasional	4,91	-

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia (data diolah)

Data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat memiliki TPT yang cukup tinggi dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia yang juga bergerak di sektor industri yang besar. Kondisi ini menunjukkan adanya ciri atau karakteristik khusus yang dimiliki Jawa Barat dalam struktur ekonomi dan pasar tenaga kerja. Secara umum, TPT di provinsi-provinsi yang berada di luar Pulau Jawa cenderung memiliki tingkat pengangguran yang lebih rendah karena perekonomian provinsi tersebut masih didominasi oleh sektor primer seperti pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Sektor primer tersebut memiliki kemampuan penyerapan tenaga kerja yang cukup besar karena masyarakat tidak harus memiliki tingkat pendidikan atau keterampilan khusus, sehingga peluang tenaga kerja untuk mendapatkan pekerjaan cukup tinggi.

Di provinsi-provinsi seperti Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten memiliki struktur ekonomi yang didominasi oleh industri manufaktur, perdagangan berbasis modern, serta sektor jasa formal. Sektor-sektor ini pada umumnya memerlukan tingkat pendidikan atau keterampilan khusus, sehingga penyerapan tenaga kerja tidak terlalu besar. Kondisi ini sering kali menimbulkan permasalahan ketidaksesuaian dengan permintaan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja. Akibatnya, meskipun banyak lapangan pekerjaan di sektor industri dan jasa, namun tidak bisa menyerap semua angkatan kerja karena keterbatasan kemampuan dan kualifikasi yang dimiliki.

Perbedaan signifikan dengan Jawa Timur (4,62%) dan Jawa Tengah (4,55%) mencerminkan keberhasilan dua provinsi tersebut dalam mengembangkan sentra UMKM berbasis kerajinan dan agribisnis yang terbukti lebih *resilient* dalam menyerap tenaga kerja berpendidikan menengah ke bawah. Hal ini menjadi pelajaran penting bagi Jawa Barat untuk mendiversifikasi basis ekonominya di luar kawasan industri besar. Temuan ini memberikan

pelajaran penting bagi Provinsi Jawa Barat dalam merumuskan strategi pembangunan ekonomi ke depan. Walaupun sektor industri manufaktur tetap menjadi penggerak utama perekonomian daerah, pemerintah daerah perlu mendorong diversifikasi ekonomi melalui pengembangan sektor UMKM, ekonomi kreatif, serta sektor agribisnis berbasis daerah. Dengan memperkuat sektor-sektor tersebut, diharapkan peluang kerja dapat semakin luas dan mampu menyerap tenaga kerja dari berbagai tingkat pendidikan dan keterampilan. Strategi ini juga dapat membantu mengurangi ketergantungan yang terlalu besar terhadap sektor industri besar serta menciptakan struktur ekonomi yang lebih seimbang dan berkelanjutan.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Naik Turunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Barat

1. Struktur Ekonomi yang Didominasi Sektor Industri Manufaktur

Salah satu pusat industri manufaktur terbesar di Indonesia berada pada Provinsi Jawa Barat.

Sebagian besar industri pengolahan di Indonesia terkonsentrasi di Provinsi Jawa Barat, yaitu sekitar 60% dari total industri nasional. Selain itu, dari 74 kawasan industri yang ada di Indonesia, sekitar 40 di antaranya berada di Jawa Barat. Meskipun demikian, sektor industri manufaktur di provinsi ini mengalami penurunan sehingga potensi tenaga kerja yang melimpah belum dimanfaatkan secara optimal (Rengganik Rengganik, 2021). Didominasi oleh sektor industri manufaktur menyebabkan permintaan tenaga kerja cenderung lebih selektif, sehingga seluruh angkatan kerja tidak dapat terserap oleh lapangan pekerjaan. Secara umum industri modern seperti ini menggunakan kualifikasi yang tinggi dan khusus karena membutuhkan keterampilan teknis, pendidikan formal, serta pengalaman kerja yang ahli. Kondisi berpotensi menimbulkan permasalahan ketidaksesuaian antara kemampuan tenaga kerja dengan kualifikasi pasar tenaga kerja, akibatnya tingkat pengangguran mengalami peningkatan.

2. Pertumbuhan Angkatan Kerja yang Relatif Tinggi

Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan jumlah angkatan kerja terbesar secara nasional, mencapai angka 26,19 juta jiwa pada 2024 (Badan Pusat Statistik (BPS), 2024). Bonus demografi yang tengah dialami Indonesia menempatkan Jawa Barat pada tekanan besar: setiap tahun sekitar 400.000-500.000 ribu penduduk memasuki pasar tenaga kerja (Kementerian Ketenagakerjaan RI, 2023). Tingginya pertumbuhan angkatan kerja ini melampaui pasar tenaga kerja formal untuk menyerap para pekerja, terutama pada kondisi

ketika pertumbuhan ekonomi tidak cukup intensif dalam menciptakan lapangan pekerjaan yang baru.

3. Dampak Perlambatan Ekonomi Akibat Pandemi COVID-19

Lonjakan tingkat pengangguran di tahun 2020 berkaitan dengan adanya pandemi *COVID-19* yang tidak hanya menyerang Jawa Barat atau Indonesia saja, namun juga menyerang banyak negara yang berakibat pada berbagai aktivitas salah satunya yaitu aktivitas perekonomian. Banyak aktivitas perekonomian seperti sektor industri dan jasa yang mengalami penurunan akibat pembatasan yang terjadi karena pandemi. Hal ini berujung pada para perusahaan besar atau pelaku usaha kecil untuk mengurangi tenaga kerja dan menutup usahanya. Menurut (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat, 2021), lebih dari 1,2 juta pekerja terdampak PHK atau dirumahkan di tahun 2020-2021. Kondisi ini secara tidak langsung mengakibatkan peningkatan jumlah pengangguran pada periode tersebut.

4. Proses Pemulihan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja Pasca Pandemi

Setelah pandemi mereda, aktivitas ekonomi perlahan kembali mengalami peningkatan dan mencapai kondisi yang cukup stabil. Meningkatnya kembali aktivitas ekonomi berdampak pada peningkatan produksi di sektor produksi, jasa, dan juga perdagangan, sehingga membuka kembali kesempatan kerja untuk para tenaga kerja dan menekan tingginya tingkat pengangguran.

5. Ketidaksesuaian Skill

Ketidaksesuaian antara kualifikasi tenaga kerja dengan kebutuhan industri menjadi salah satu faktor struktural yang memengaruhi tingkat pengangguran di Jawa Barat. Berdasarkan data SAKERNAS 2024, sekitar 61,3% pencari kerja di Jawa Barat masih berpendidikan SMA ke bawah, sementara sektor industri manufaktur modern dan jasa berbasis teknologi semakin membutuhkan tenaga kerja dengan pendidikan minimal diploma atau sarjana serta kemampuan digital. Permasalahan ini juga berkaitan dengan ketidaksesuaian antara pendidikan vokasional dan kebutuhan pasar kerja. Data (Badan Pusat Statistik, 2024), menunjukkan bahwa tingkat pengangguran yang berasal dari lulusan SMK di Jawa Barat mencapai 12,74% lebih tinggi dibandingkan dengan pengangguran yang berasal dari lulusan SMA sebesar 10,19%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kurikulum pendidikan vokasi belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan industri.

D. KESIMPULAN

Hasil kajian terhadap data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Barat sepanjang tahun 2014 hingga 2024 memperlihatkan bahwa pergerakan angka pengangguran bersifat fluktuatif, yang tidak terlepas dari pengaruh kondisi perekonomian, karakteristik pasar tenaga kerja, serta berbagai guncangan eksternal, terutama pandemi *COVID-19*. Dalam kurun waktu 2014–2016, angka TPT cenderung bergerak naik secara perlahan, yakni dari 8,45% menjadi 8,89%. Fenomena ini mencerminkan ketidakseimbangan antara laju pertumbuhan angkatan kerja yang terus bertambah dengan kapasitas pasar tenaga kerja dalam menyediakan lapangan pekerjaan yang memadai. Kondisi tersebut semakin diperparah oleh sifat perekonomian di Jawa Barat yang bertumpu pada sektor industri manufaktur, di mana permintaan terhadap tenaga kerja bersifat selektif dan tidak mampu menyerap seluruh pencari kerja.

Berbeda dengan fase sebelumnya, rentang waktu 2017–2019 diwarnai oleh penurunan TPT secara bertahap dari 8,22% menjadi 8,04%. Perbaikan ini dipicu oleh meningkatnya arus investasi, ekspansi sektor industri dan jasa, serta pelaksanaan berbagai program pelatihan tenaga kerja yang berkontribusi pada peningkatan kompetensi angkatan kerja. Namun, pemulihan yang sedang berlangsung tersebut terhenti secara mendadak ketika pandemi *COVID-19* melanda pada tahun 2020. Dampak pandemi terhadap pasar tenaga kerja sangat signifikan, terlihat dari lonjakan TPT ke angka 10,46% yang merupakan posisi tertinggi dalam satu dekade penelitian ini. Kenaikan drastis tersebut dipicu oleh terhambatnya aktivitas perekonomian, banyaknya usaha yang terpaksa menutup kegiatan operasional, dan gelombang pemutusan hubungan kerja yang melanda hampir seluruh sektor.

Tahun 2021 menandai awal mula pemulihan pasar tenaga kerja, dengan TPT yang mulai turun ke angka 9,82%, meski masih terbilang tinggi. Momentum pemulihan berlanjut secara lebih nyata pada periode 2022–2024, di mana TPT mengalami penurunan berturut-turut dari 8,31% pada 2022, kemudian 7,44% pada 2023, hingga mencapai 6,75% pada tahun 2024. Tren positif ini menggambarkan bahwa roda perekonomian di Provinsi Jawa Barat mulai bangkit dan pulih pasca pandemi yang secara perlahan membuka kembali peluang-peluang kerja bagi para masyarakat secara luas. Meskipun demikian, angka 6,75% pada tahun 2024 masih jauh melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 4,91%, sehingga menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat masih dihadapkan pada sejumlah tantangan struktural yang belum terselesaikan.

Berbagai faktor yang menjadi akar permasalahan tersebut mencakup dominasi industri manufaktur yang mensyaratkan keahlian secara spesifik, tekanan pertumbuhan angkatan kerja yang terus meningkat setiap tahunnya, dampak negatif pandemi terhadap perekonomian, proses pemulihan yang membutuhkan waktu panjang, serta kesenjangan antara kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan riil dalam dunia industri. Atas dasar itu, diperlukan langkah-langkah penanganan yang menyeluruh dan berkesinambungan, mencakup perluasan kesempatan kerja melalui kebijakan pembangunan ekonomi yang inklusif sekaligus peningkatan mutu sumber daya manusia agar pasar tenaga kerja Jawa Barat dapat berkembang secara lebih sehat dan berkelanjutan. Dengan demikian, upaya dalam mengurangi tingkat pengangguran perlu dilakukan secara efektif dan menyeluruh melalui penguatan sektor-sektor ekonomi yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi. Selain itu, peningkatan kualitas tenaga kerja juga menjadi faktor penting agar angkatan kerja mampu beradaptasi dengan kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang.

Saran

Merujuk pada temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian tentang dinamika TPT Provinsi Jawa Barat selama 2014–2024, berikut ini disampaikan sejumlah rekomendasi kebijakan yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah maupun pemangku kepentingan terkait dalam upaya menekan angka pengangguran sekaligus memperluas daya serap tenaga kerja.

Pertama, pemerintah daerah perlu mengintensifkan upaya penciptaan lapangan kerja dengan mengandalkan pengembangan sektor-sektor ekonomi yang memiliki kapasitas penyerapan tenaga kerja yang lebih besar. Di samping terus mengoptimalkan sektor industri manufaktur yang telah lama menjadi tulang punggung perekonomian daerah, penting pula untuk mendorong pertumbuhan UMKM, industri kreatif, dan agribisnis berbasis potensi lokal yang ada di wilayah tersebut. Langkah pengembangan ini dapat bertujuan untuk melepaskan ketergantungan yang berlebihan pada sektor industri yang berskala besar, sekaligus membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat dari berbagai latar belakang pendidikan dan keterampilan yang dimiliki.

Kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia harus ditempatkan sebagai agenda prioritas dan utama dalam strategi mengurangi tingkat pengangguran yang ada. Upaya ini perlu diwujudkan melalui pembenahan sistem pendidikan secara menyeluruh, penguatan jalur pendidikan vokasi, serta penyelenggaraan pelatihan kerja yang dirancang sesuai dengan tuntutan industri masa kini. Program pelatihan berbasis kompetensi yang dibangun atas

dasar kerja sama dengan dunia usaha sangat diperlukan agar tenaga kerja yang dihasilkan benar-benar siap dan relevan dengan kebutuhan pasar pada masa kini.

Ketiga, kebijakan yang mendukung peningkatan investasi di berbagai sektor perlu diperkuat oleh pemerintah daerah. Masuknya investasi secara signifikan akan menggerakkan perekonomian daerah sekaligus menciptakan lapangan kerja baru dalam jumlah yang banyak. Untuk itu, penciptaan kondisi usaha yang kondusif sangat diperlukan, antara lain melalui reformasi dan penyederhanaan prosedur perizinan, peningkatan kualitas infrastruktur penunjang, serta penyusunan regulasi yang mampu memberikan kepastian dan rasa aman bagi para investor.

Keempat, perlu dibangun hubungan yang lebih erat antara pemerintah, institusi pendidikan, dan sektor industri guna mewujudkan ruang lingkup ketenagakerjaan yang fungsional dan responsif. Kolaborasi tersebut dapat diwujudkan melalui program magang industri yang terstruktur, pemutakhiran kurikulum pendidikan agar selaras dengan kebutuhan pasar kerja, serta penyelenggaraan pelatihan yang langsung melibatkan peran aktif industri. Dengan terjalinnya kerja sama yang erat antara ketiga pihak tersebut, diharapkan para lulusan pendidikan memiliki kesiapan yang lebih baik untuk memasuki dunia kerja dan mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja di berbagai lapangan usaha yang sudah diberikan.

Kelima, bagi para peneliti yang akan melanjutkan kajian pada topik serupa, disarankan untuk memperluas cakupan analisis dengan memasukkan variabel-variabel tambahan yang turut berkontribusi terhadap dinamika pengangguran, seperti laju pertumbuhan ekonomi daerah, capaian tingkat pendidikan masyarakat, tingkat inflasi, besaran upah minimum regional, serta volume investasi yang masuk. Penambahan variabel-variabel tersebut diharapkan mampu menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan mendalam, sehingga rekomendasi kebijakan yang dihasilkan pun akan lebih akurat dan tepat sasaran.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2018). PROFIL PENGANGGURAN MALUKU UTARA AGUSTUS 2017. BPS Provinsi Maluku Utara.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Keadaan Ketenagakerjaan Sumatera Utara Agustus 2023.
- Badan Pusat Statistik. (2024). Laporan eksekutif keadaan angkatan kerja Provinsi Jawa Barat Agustus 2024.
- Badan Pusat Statistik. (2025). Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase

Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Provinsi, 2024.

Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). Berita Resmi Statistik: Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2024.

Badan Pusat Statistik (BPS). (2025). Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi.

Darmawan, A. S., & Mifrahi, M. N. (2022). Analisis tingkat pengangguran terbuka di Indonesia periode sebelum dan saat pandemi covid-19. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*, 1(1), 111–118.

David, Y. B., Engka, D. S. M., & Sumual, J. I. (2019). PENGARUH ANGKATAN KERJA BEKERJA DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP PENGANGGURAN DI SULAWESI UTARA. *Jurnal EMBA*, 7(8), 3389–3397.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat. (2021). Laporan Dampak COVID-19 terhadap Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat.

Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2012). *Dasar-Dasar Ekonometrika* (5th ed.). Salemba Empat.

Kementerian Ketenagakerjaan RI. (2023). Laporan Pasar Kerja Nasional 2023.

Munawir, & Saharuddin. (2023). PENGARUH PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK) DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) TERHADAP PDRB DI PROVINSI ACEH. *Jurnal Ekonomika Indonesia*, 12(1).

Muslim, M. R. (2014). PENGANGGURAN TERBUKA DAN DETERMINANNYA. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 15(2), 171–181.

Ningsih, S., Alfisyahri, N., Irawan, D., & Putra, R. (2025). ANALISIS INKLUSI KEUANGAN DAN PERTUMBUHAN INKLUSIF TERHADAP KESEMPATAN KERJA DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA: MENGGUNAKAN PENDEKATAN PANEL SIMULTAN. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(204), 1356–1386.

Pamungkas, B. D., & Kartika, M. (2025). DETERMINAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI INDONESIA. *Jurnal Ekonomi Integra*, 15(2).

Pasaribu, E. (2022). PEMBUKTIAN OKUN'S LAW DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. *CONVERGENCE: THE JOURNAL OF ECONOMIC DEVELOPMENT*, 4(2), 153–165.

Puspita, K. Della, & Athoillah, M. (2024). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI JAWA TIMUR 2012-2022. *JOURNAL OF DEVELOPMENT ECONOMIC AND SOCIAL STUDIES*, 3(4).

- Rengganik Rengganik, S. S. (2021). Analisis Total Faktor Produktivitas Industri Manufaktur Di Jawa Barat (2010-2015). Journal Article // Indikator. <https://doi.org/10.22441/indikator.v5i2.6361>
- Sayifullah, & Gandasari, T. R. (2016). PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PENGANGGURAN TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI BANTEN. Jurnal Ekonomi-Qu (Jurnal Ilmu Ekonomi), 6(2), 245.
- Septiyanto, W. G., & Tusianti, E. (2020). Analisis Spasial Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat. Jurnal Ekonomi Indonesia, 9(2), 119.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Sukirno, S. (1994). Pengantar Ekonomi Makro. PT Raja Grafindo Persada.